

PEMBERDAYAAN UMKM DAN UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI DAERAH: SEBUAH TELAAH KONSEP

Hananiel M. Gunawan
Program Studi Manajemen-Fakultas Ekonomi
Universitas Pelita Harapan Surabaya
hananiel.nathan@uphsurabaya.ac.id

Abstrak

UMKM memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara. Dengan proporsi jumlah UMKM yang jauh di atas usaha skala besar, UMKM sangat berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja sektor informal dan pemerataan pendapatan masyarakat daerah. Di sisi lain, program pengentasan kemiskinan oleh Pemerintah juga dirasakan belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan suatu konsep pemberdayaan UMKM dalam upaya pengentasan kemiskinan di daerah. Berdasarkan kajian literatur yang intensif, penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai permasalahan dan pertumbuhan UMKM, program pengentasan kemiskinan, khususnya di Indonesia, serta melakukan *benchmarking* terhadap berbagai program dan kebijakan. Pada akhirnya, penelitian ini memberikan arahan kebijakan bagi UMKM dan upaya pengentasan kemiskinan di daerah.

Kata kunci: konsep pemberdayaan UMKM dan pengentasan kemiskinan, kajian literatur, *benchmarking*, kebijakan

Gambaran Umum Peran UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu prioritas pengembangan di setiap Negara. Hal ini disebabkan oleh besarnya sumbangsih UMKM terhadap Negara, khususnya dalam bidang ekonomi dan sosial. Selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara, UMKM sangat berperan dalam penyerapan tenaga kerja sektor informal dan pemerataan pendapatan masyarakat, khususnya di daerah. Oleh karena itu, berbagai kebijakan dan program pendukung telah dirumuskan dan diimplementasikan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung pemberdayaan UMKM dan pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan. Kebijakan dan program pendukung tersebut bertujuan untuk melindungi dan mengembangkan UMKM melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif.

Peran UMKM bukan hanya dirasakan oleh Negara berkembang saja. Negara-negara maju pun mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan oleh karena adanya pertumbuhan UMKM. Sebagai contoh, negara-negara maju di Eropa memiliki proporsi UMKM di atas 90% (Johnson, 2007). Beberapa Negara di Asia Pasifik juga mengalami hal yang sama dengan Negara-negara di Eropa. Sebagai contoh, Negara Taiwan dan Korea juga merasakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan oleh karena pertumbuhan UMKMnya (Hall dan Harvie, 2003). Bahkan Jepang telah mengeluarkan kebijakan untuk terus meningkatkan inovasi UMKM (Storz, 2006).

Secara lebih spesifik, Tambunan (2011) menyatakan bahwa UMKM memiliki peran yang besar bagi negara berkembang, secara ekonomi dan sosial. Pernyataan

tersebut didukung oleh karakteristik UMKM sebagai berikut:

1. tersebar secara luas di berbagai daerah dan berperan dalam ekonomi daerah
2. kemampuan dalam mempekerjakan tenaga kerja setempat sehingga menunjang ekonomi lokal
3. kemampuan dalam menyediakan peluang pengembangan keahlian bisnis dan wirausaha.

Karakteristik inilah yang membuat UMKM terus bertahan, sekalipun dalam kondisi lingkungan bisnis yang tidak menentu dan ketat. UMKM juga terbukti dalam menjaga ekonomi daerah dan negara ketika terjadi krisis keuangan dunia.

Permasalahan dalam Pertumbuhan UMKM di Indonesia

Pertumbuhan usaha merupakan salah satu kajian yang menarik dan terus mengalami peningkatan. Studi terhadap pertumbuhan UMKM telah banyak dilakukan oleh para peneliti dan berbagai disiplin ilmu, antara lain ilmu ekonomi, manajemen, teknik, dan kebijakan publik (Stam, 2010). Melalui kajian yang intensif, para peneliti berusaha untuk mengetahui faktor penentu terjadinya pertumbuhan usaha.

Meskipun banyak studi terkait pertumbuhan UMKM, belum terlihat studi yang mengaitkan dengan permasalahan kemiskinan. Studi pertumbuhan UMKM sangat spesifik kepada factor-faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan UMKM tersebut. Hal ini memberikan peluang untuk melakukan kajian intensif terhadap pertumbuhan UMKM dan dampaknya terhadap kemiskinan.

Sebagai usaha yang memiliki keterbatasan dalam sumber daya, UMKM mengalami berbagai permasalahan mendasar. Permasalahan ini merupakan permasalahan umum di setiap Negara. Tambunan (2011)

merangkum permasalahan dan keterbatasan UMKM, antara lain kurangnya modal, informasi bisnis, teknologi, tenaga ahli, kesulitan dalam pengadaan barang, pemasaran dan distribusi, serta aturan dan kebijakan pemerintah.

Untuk menjamin adanya pertumbuhan UMKM, pemerintah Indonesia memiliki berbagai program dan kebijakan yang memadai. Dengan proporsi unit usaha yang mencapai 99,99% dan mampu menyerap tenaga kerja rata-rata 97%, UMKM di Indonesia merupakan unit usaha penopang stabilitas ekonomi dan pendapatan di masyarakat. Secara rinci, perkembangan jumlah unit usaha dan penyerapan tenaga kerja UMKM sepanjang tahun 2005-2010 ditunjukkan pada tabel 1.

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa secara rata-rata, proporsi unit usaha UMKM di Indonesia dan penyerapan tenaga kerjanya cenderung stabil. Pada saat masa krisis dunia di tahun 2008, terlihat bahwa proporsi jumlah UMKM terhadap usaha skala besar cenderung meningkat. Hal ini yang membuat Negara dan bangsa Indonesia tidak terlalu merasakan dampak dari krisis tersebut. Secara penyerapan tenaga kerja, UMKM di Indonesia menjadi tumpuan dalam menjaga dan mengurangi angka pengangguran. Bila UMKM tidak dapat bertahan dalam persaingan bisnis, akan berdampak pada banyaknya tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya. Dampak jangka panjangnya adalah tingginya angka kemiskinan di daerah tersebut. Untuk itulah, pertumbuhan UMKM dan pengentasan kemiskinan menjadi permasalahan mendasar dan penting, khususnya bagi Negara Indonesia.

Tabel 1. Perkembangan Data UMKM dan Usaha Besar Tahun 2005 – 2010

TAHUN	JUMLAH UNIT USAHA				JUMLAH TENAGA KERJA			
	SKALA USAHA				SKALA USAHA			
	UMKM		Besar		UMKM		Besar	
	(Unit)	Pangsa (%)	(Unit)	Pangsa (%)	(Orang)	Pangsa (%)	(Orang)	Pangsa (%)
2005	47,017,062	99.99	5,022	0.01	83,586,616	96.85	2,719,209	3.15
2006	49,021,803	99.99	4,577	0.01	87,909,598	97.30	2,441,181	2.70
2007	50,145,800	99.99	4,463	0.01	90,491,930	97.27	2,535,411	2.73
2008	51,409,612	99.99	4,650	0.01	94,024,278	97.15	2,756,205	2.85
2009 ^{*)}	52,764,603	99.99	4,677	0.01	96,211,332	97.30	2,674,671	2.70
2010 ^{**)}	53,823,732	99.99	4,838	0.01	99,401,775	97.22	2,839,711	2.78
Keterangan:								
*) Angka Sementara								
**) Angka Sangat Sementara								

Sumber: Depkop.go.id

Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan suatu konsep pemberdayaan UMKM dalam upaya pengentasan kemiskinan di daerah. Pada sub bab selanjutnya akan dielaborasi kajian literatur yang intensif terhadap pertumbuhan UMKM, yaitu melalui publikasi ilmiah, baik teori/konsep maupun hasil kajian empiris. Pada akhirnya, penelitian ini akan menghasilkan suatu konsep tahapan pemberdayaan UMKM untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, khususnya di Indonesia. *Benchmarking* terhadap berbagai program dan kebijakan pengembangan UMKM juga disertakan untuk memperkuat konsep.

Permasalahan Kemiskinan

Kemiskinan, secara sederhana, dapat diartikan sebagai kondisi kekurangan yang terjadi pada seseorang. Kekurangan ini disebabkan oleh ketidakmampuannya untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Mereka yang hidup dalam kemiskinan akan mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhannya, khususnya dalam kebutuhan akan makanan, kesehatan, dan pendidikan.

Di Indonesia, tercatat terdapat 190 daerah tertinggal dan masuk kategori sebagai daerah miskin (ILO, 2005). Pengentasan

kemiskinan telah merupakan amanat konstitusi. Berbagai program pengentasan kemiskinan telah dirumuskan untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Sebagai contoh, pemerintah Indonesia telah menetapkan program dan kebijakan yang pemberdayaan masyarakat melalui kemudahan kredit usaha. Sektor perpajakan juga telah berpihak kepada masyarakat golongan ekonomi lemah. Pemerintah telah membedakan besaran pajak yang harus dibayar oleh masyarakat mampu, misalnya melalui pajak progresif kendaraan.

Besarnya angka kemiskinan memberikan konsekuensi terhadap masyarakat dan bangsa. Konsekuensi kemiskinan, dalam jangka panjang, akan memunculkan kesenjangan sosial dalam masyarakat yang memicu rusaknya relasi sosial dalam masyarakat. Kemiskinan, dalam cakupan yang lebih luas, akan menyebabkan penurunan daya saing sumber daya bangsa. Hal ini berarti bahwa kemiskinan harus dientas seiring waktu dengan berbagai program dan kebijakan yang relevan.

Kemiskinan merupakan salah satu fenomena sosial yang kompleks. Cara penyelesaian kemiskinan dalam sudut pandang yang terfragmentasi, tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan ini

secara tuntas. Kemiskinan akan hilang dengan sendirinya seiring dengan meningkatnya penghasilan masyarakat golongan ekonomi lemah. Penghasilan inilah yang menentukan standar dan kualitas hidup seseorang. Upaya-upaya terintegrasi yang mampu meningkatkan penghasilan rakyat miskin melalui pekerjaan yang stabil dan merakyat perlu dipikirkan oleh pemerintah daerah.

Upaya Pemberdayaan UMKM untuk Pengentasan Kemiskinan

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang memiliki keunggulan sumber daya alam yang melimpah. Namun demikian, dalam hal sumber daya manusia, Indonesia masih sangat tertinggal dengan Negara-negara lain. Kondisi ini merupakan kondisi yang menyedihkan. Berlimpahnya sumber daya alam Indonesia tidak mampu dikelola dengan baik oleh karena kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, muncul fenomena sosial di masyarakat yang tak kunjung selesai, yaitu permasalahan kemiskinan.

Dengan bertitik tolak pada diberlakukannya otonomi daerah, wewenang pengembangan daerah dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara maksimal. Walaupun pemerintah daerah telah berupaya keras dalam penanggulangan kemiskinan di daerahnya. Namun demikian, dalam prakteknya upaya ini dirasakan tidak maksimal. Secara kuantitas, angka kemiskinan tidak mengalami penurunan yang signifikan. Begitu mudah ditemui orang yang masih hidup di bawah standar yang layak.

Di sisi lain, UMKM yang ada di daerah masih belum dikelola dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sangat sedikitnya produk UMKM unggulan yang mampu bersaing di pasar lokal, terlebih di pasar internasional. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah

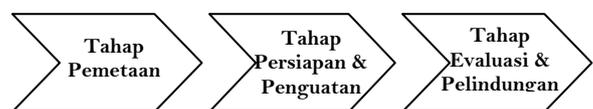
UMKM yang ada di setiap daerah di Indonesia. Hal ini mengindikasikan belum maksimalnya pemberdayaan UMKM di daerah.

Pemberdayaan UMKM di daerah harus dilakukan sebagai satu kesatuan dalam upaya pengentasan kemiskinan daerah tersebut. Rakyat miskin umumnya memiliki tingkat pendidikan rendah sehingga sulit untuk berkompetisi dalam dunia kerja. Di sisi lain, UMKM merupakan unit usaha yang mempekerjakan tenaga kerja sektor informal. Kondisi ini sudah seharusnya dipandang sebagai salah satu indikasi perlunya pemberdayaan UMKM sebagai sarana dalam pengentasan kemiskinan.

Arah Kebijakan

Penrose (1959) telah mengindikasikan pentingnya peran pemerintah dalam menunjang pertumbuhan usaha. Walaupun tidak rinci, ia telah mengatakan bahwa pemerintah harus memberikan *continous input* kepada suatu usaha (Connell, 2009). Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga kesinambungan dari UMKM daerahnya serta menekan kemiskinan di daerahnya melalui perumusan kebijakan yang efektif.

Dari berbagai uraian terkait UMKM dan kemiskinan, dapat direkomendasikan suatu arahan kebijakan melalui tiga tahap serial yang ditunjukkan pada gambar 1.



Gambar 1. Tahapan dalam arahan kebijakan

Pertama, pemerintah daerah harus melakukan pemetaan potensi usaha yang ada di daerahnya. Pertimbangan adanya potensi usaha di suatu daerah harus didasarkan pada adanya sumber daya alam lokal dan keahlian turun-temurun dari masyarakat setempat.

Potensi usaha, khususnya di sektor manufaktur harus menjadi perhatian lebih pemerintah daerah. Sektor manufaktur, dalam jangka panjang, akan mempengaruhi tumbuhnya sektor lain di daerah tersebut. Sektor manufaktur juga berpotensi menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan sektor jasa.

Pada tahap persiapan, pemerintah daerah juga harus memetakan kemiskinan di daerah tersebut. Pemberdayaan UMKM yang berasal dari potensi usaha yang telah diidentifikasi di suatu daerah, harus sinergi dengan pengentasan kemiskinan di daerah tersebut. ILO (2005) menyatakan bahwa program pengentasan kemiskinan dapat berhasil bila pemerintah dapat menyediakan akses pekerjaan, khususnya pada UMKM di daerah. Setelah melakukan pemetaan potensi usaha dan kemiskinan, pemerintah menetapkan usaha yang akan dikembangkan, baik itu usaha yang baru maupun yang sedang berjalan.

Kedua, pemerintah daerah harus melakukan persiapan dan penguatan sebelum usaha ini dikembangkan secara intensif. Selain mengidentifikasi faktor internal dan eksternal bagi usaha tersebut, pemerintah daerah diharapkan untuk mengidentifikasi sektor lain yang berpotensi untuk dikembangkan di daerah tersebut, misal usaha di sektor jasa. Teruel-Carrizosa (2008) mengemukakan bahwa UMKM berperan sebagai katalis untuk pengembangan sektor industri lokal. Hal ini berarti bila ada suatu usaha di suatu tempat, maka akan muncul usaha-usaha lain di tempat tersebut.

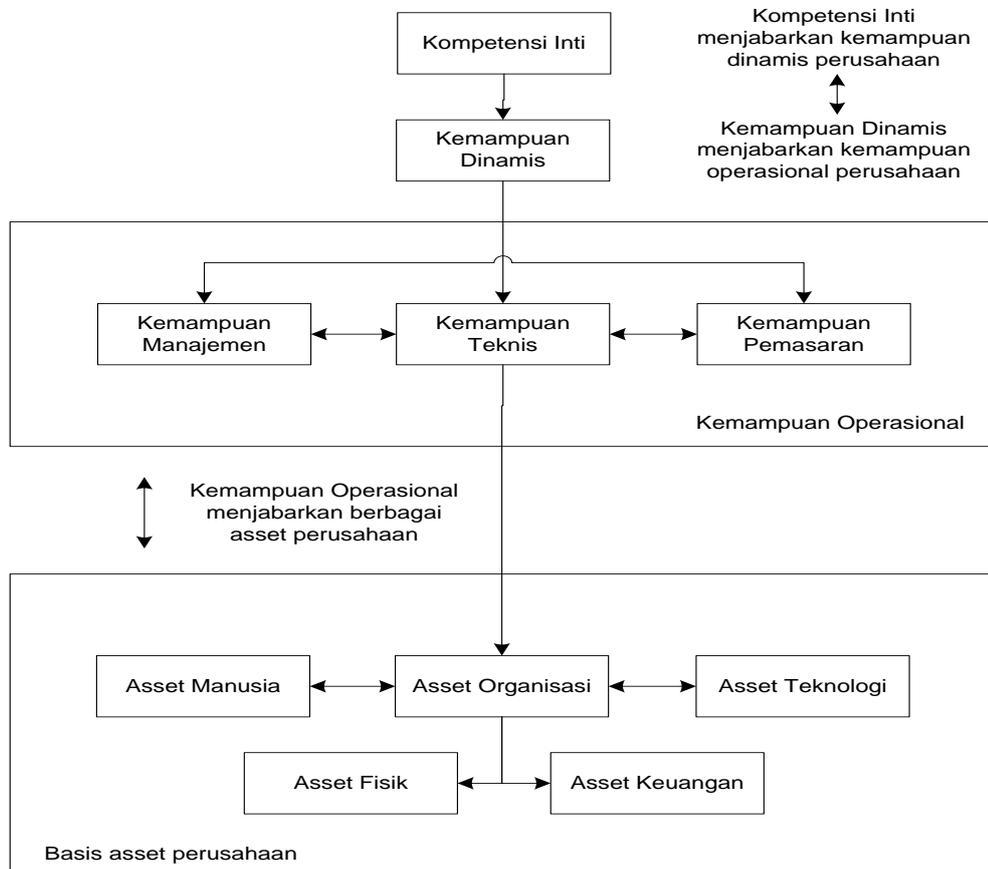
Persiapan dan penguatan yang harus juga menjadi fokus utama adalah *human capital*. Berbagai riset telah menunjukkan pentingnya *human capital*, dalam hal ini peran manajer dalam pertumbuhan UMKM (lihat (Lafuente dan Rabetino, 2011; Javalgi dan Todd, 2011 ; Rauch dan Rijdsdijk, 2011). Dalam jangka panjang, *human capital* yang

kuat akan mampu mengarahkan UMKM untuk dapat terus bersaing dan berkembang. Hal lain yang perlu dipersiapkan adalah terkait teknologi, keuangan, dan akses pasar. Dengan melakukan persiapan dan penguatan yang tepat, akan terdapat banyak UMKM (sektor manufaktur dan jasa) yang dapat berdiri dan bertumbuh secara maksimal.

Secara khusus, pengembangan *human capital* ditujukan bukan hanya kepada pelaku usaha saja. Masyarakat golongan ekonomi lemah di daerah tersebut juga harus mendapat perhatian. Mereka harus dipersiapkan untuk dapat bekerja di UMKM tersebut agar pemberdayaan UMKM berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan di daerah tempat UMKM beroperasi.

Pemerintah dan pelaku usaha harus mempersiapkan sumber daya yang dibutuhkan untuk memulai usaha baru atau untuk mengembangkan usaha yang ada. Sumber daya perusahaan merupakan modal utama bagi perusahaan untuk dapat bersaing dan memenangkan kompetisi bisnis (de Oliveira Wilk dan Fensterseifer, 2003). Bagaimana sumber daya dalam menciptakan kompetensi inti yang membawa perusahaan dalam memenangkan persaingan, ditunjukkan pada gambar 2.

Berdasarkan gambar 2, dapat dilihat bahwa sumber daya merupakan aset perusahaan, meliputi aset *tangible* dan *intangible*. Kumpulan aset ini bila dikelola dengan baik, akan mendukung kemampuan operasional perusahaan, yaitu kemampuan manajemen, teknis, dan pemasaran. Kemampuan operasional ini juga memungkinkan manajer untuk mengembangkan aset perusahaan. Kemampuan operasional perusahaan akan mendukung kemampuan dinamis perusahaan. Kemampuan dinamis ini juga memungkinkan manajer untuk mengembangkan kemampuan operasional perusahaan. Akumulasi dari pembelajaran perusahaan akan menghasilkan kompetensi inti perusahaan (Zubac dkk., 2010).



Gambar 2. Sumber daya perusahaan dan inter relasinya

Sumber: Zubac dkk., (2010)

Ketiga, tahap evaluasi dan perlindungan bagi UMKM. Pada tahap ini, pemerintah daerah harus terus memonitor dan mengevaluasi kinerja dari UMKM dan pengaruhnya terhadap angka kemiskinan di daerah UMKM tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi, pemerintah dapat mengambil tindakan-tindakan yang penting bagi kemajuan UMKM dan upaya pengentasan kemiskinan di daerah tersebut. Hal lain yang penting adalah memberikan perlindungan bagi keberlangsungan UMKM. Connell (2008) menyatakan bahwa industri lokal harus diberi proteksi oleh pemerintah. Secara khusus, UMKM adalah unit usaha yang memiliki daya saing dan rentan tersingkir

dalam persaingan bisnis. Dalam era globalisasi seperti ini, dimana pemain dalam industri semakin banyak dan kuat, pemerintah daerah harus berperan aktif dalam memberikan kebijakan yang bersifat melindungi pertumbuhan industri lokal. Namun juga harus dimengerti bahwa perkembangan teknologi telekomunikasi telah berubah secara signifikan, khususnya penggunaan internet (Wright dan Etemad, 2001; Dholakia dan Khsetri, 2004). Proteksi industri lokal harus disertai dengan pelatihan penggunaan internet dalam berbisnis secara strategis (Ordanini dan Rubera, 2008).

Kesimpulan

Program pengentasan kemiskinan seharusnya diintegrasikan dengan program pemberdayaan UMKM. Tanpa integrasi ini, pemberdayaan UMKM hanya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah saja, dan tidak akan berpengaruh pada penurunan angka kemiskinan di daerah (Beck dkk., 2005). Pemberdayaan harus dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dilakukan oleh Negara-negara maju, seperti Negara di Eropa, Taiwan, Korea, dan Jepang. Bila dikelola dengan baik, UMKM memiliki potensi yang besar untuk berkembang secara internasional.

Perumusan kebijakan pemberdayaan UMKM untuk pengentasan kemiskinan daerah, sebaiknya dirumuskan berdasarkan tahapan yang telah ditetapkan, sehingga mampu dirasakan manfaatnya oleh UMKM dan masyarakat setempat. Program dan kebijakan akan mudah dirumuskan bila setiap tahapan terlaksana dengan baik.

Dalam memberdayakan UMKM, pemerintah daerah diharapkan terlibat aktif dalam menjamin kemitraan pada pihak eksternal demi menjamin keberlangsungan UMKM tersebut. Sebagai contoh, dalam mendukung pertumbuhan UMKM, pemerintah Inggris menyediakan jalinan kerjasama bisnis dan konsultan bagi UMKM (Robson dan Bennett, 2000).

Mengingat penelitian ini masih bersifat konsep, maka pengembangan penelitian selanjutnya sangat perlu untuk dilakukan. Sebagai contoh, penjabaran teknis dari setiap tahapan dalam arah kebijakan perlu mendapat perhatian khusus. Berdasarkan penjabaran teknis tersebut, program dan kebijakan pemerintah daerah terhadap pemberdayaan UMKM dan pengentasan kemiskinan akan mudah dirumuskan secara tepat.

Daftar Pustaka

- Connell, C.M. (2008), "Firm and Government as Actors in Penrose's Process Theory of International Growth: Implications for the Resource-Based View and Ownership-Location-Internationalisation Paradigm", *Australian Economic History Review*, Vol. 48 No. 2, pp. 170–194.
- Connell, C.M. (2009), "Method, Structure and Argument in Edith Penrose's Theory of Growth", *Review of Political Economy*, Vol. 21 No. 4, pp. 549–566.
- Dholakia, R.R. dan Khsetri, N. (2004), "Factor Impacting the Adoption of the Internet among SMEs", *Small Business Economics*, Vol. 23 No. 4, pp. 311–322.
- Hall, C. dan Harvie, C. (2003), "A comparison of the performance of SMEs in Korea and Taiwan: policy implications for turbulent times", available at: <http://ro.uow.edu.au/commwkpapers/71/> (accessed 30 November 2012).
- ILO. (2005), *SME Development in The Poverty Reduction Program: TRADE AND LABOR ISSUES*, International Labour Organization.
- Javalgi, R. (Raj) G. dan Todd, P.R. (2011), "Entrepreneurial orientation, management commitment, and human capital: The internationalization of SMEs in India", *Journal of Business Research*, Vol. 64 No. 9, pp. 1004–1010.
- Lafuente, E. dan Rabetino, R. (2011), "Human capital and growth in Romanian small firms", *Journal of Small Business and Enterprise Development*, Vol. 18 No. 1, pp. 74–96.
- De Oliveira Wilk, E. dan Fensterseifer, J.E. (2003), "Use of resource-based view in industrial cluster strategic analysis", *International Journal of Operations & Production Management*, Vol. 23 No. 9, pp. 995–1009.
- Ordanini, A. dan Rubera, G. (2008), "Strategic capabilities and internet resources in procurement: a resource-based view of B-to-B buying process", *International Journal of Operations & Production Management*, Vol. 28 No. 1, pp. 27–52.

- Rauch, A. dan Rijsdijk, S.A. (2011), "The Effects of General and Specific Human Capital on Long-Term Growth and Failure of Newly Founded Businesses", *Entrepreneurship Theory and Practice*, p. no–no.
- Stam, E. (2010), "Growth beyond Gibrat: firm growth processes and strategies", *Small Business Economics*, Vol. 35 No. 2, pp. 129–135.
- Tambunan, T.T.H. (2011), "Development of small and medium enterprises in a developing country: The Indonesian case", *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, Vol. 5 No. 1, pp. 68–82.
- Wright, R.W. dan Etemad, H. (2001), "SMEs and the global economy", *Journal of International Management*, Vol. 7, pp. 151–154.
- Zubac, A., Hubbard, G. dan Johnson, L.W. (2010), "The RBV and value creation: a managerial perspective", *European Business Review*, Vol. 22 No. 5, pp. 515–538.